

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PUPUK UNTUK MASYRAKAT DESA KAPUL DAN DESA HAUWAI DI KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN

Mahmuhda¹, Ni Made Musiyani Anjasmari², Siti Raudah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: Muhdabigmuck@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini terdapat ada beberapa masalah dilapangan seperti, Belum tepatnya sasaran, sebagian kelompok tani tidak mendapat bantuan secara merata, Kurangnya pegawai penyuluh sehingga mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan bantuan datang. Kurangnya SOP terkait program Bantuan Pupuk. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Implementasi Program Bantuan Pupuk untuk Masyarakat Desa Kapul dan Desa Hauwai Di Kecamatan Halong dan Faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kualitatif., teknik pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian data (*Data display*) dan kesimpulan (*Conclusion Verification*). Data yang telah di dapat diuji kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi, dan member check. Implementasi Program Bantuan Pupuk untuk Masyarakat Desa Kapul dan Desa Hauwai Di Kecamatan Halong cukup baik. Indikator pertama Sosialisai sudah baik, Koordinasi sudah baik, Sumber daya manusia Sudah baik, Sumber daya material, dalam hal anggran masih kurang baik karena masih banyak kelompok tani tidak kebagian pupuk. Fasilitas masih kurang baik, Wewenang sudah baik karena pemerintah bertanggung jawab dalam hal program ini. Respon sudah baik, Pengawasan, kurang baik, SOP kurang baik Pencapaian Tujuan, kurang baik karena masih banyak masyarakat tidak mendapatkan bantuan. Faktor yang mempengaruhi antara lain; Masih banyak kelompok tani yang tidak membuat permohonan berupa proposal, Kurangnya pengawasan, Bantuan datang kurang tepat. Faktor Pendukung; Adanya Sosialisasi, Adanya Sumber daya Manusia, Adanya Respon, Adanya Wewenang dan Adanya Koordinasi.

Kata Kunci : Implementasi, Program

ABSTRACT

*In this research, there are several problems in the field, such as: The targets are not yet precise, some farmer groups do not receive assistance evenly, there is a lack of extension staff, which results in frequent delays in the arrival of assistance. Lack of SOPs related to the Fertilizer Assistance program. This research aims to determine the implementation of the Fertilizer Assistance Program for the Community of Kapul Village and Hauwai Village in Halong District and the influencing factors. This research uses a descriptive-qualitative type. Data collection techniques are used by means of interviews, observation and documentation. Data analysis techniques use data reduction (*Data Reduction*), data presentation (*Data display*) and conclusions (*Conclusion Verification*). Data that has been tested can be tested for data credibility through extended observations, increased persistence, triangulation, negative case analysis, using reference materials, and member checking. The implementation of the Fertilizer Assistance Program for the Community of Kapul Village and Hauwai Village in Halong District is quite good. The first indicator is that socialization is good, coordination is good, human resources are good, material resources, in terms of budget are still not good because there are still many farmer groups that do not receive fertilizer. Facilities are still not good, authority is good because the government is responsible for this program. Response is good, Supervision is not good, SOP is not good Achievement of Goals is not good because there are still many people who do not receive assistance. Factors that influence include; There are still many farmer groups that do not make requests in the form of proposals, there is a lack of supervision, and assistance does not arrive properly. Supporting factors; There is socialization, there are human resources, there is response, there is authority and there is coordination.coordination.*

Keywords : Implementation, program

PENDAHULUAN

Tanaman pangan merupakan suatu komoditas utama untuk masyarakat Indonesia oleh karena itu biasa disebut sebagai makanan pokok. Beras merupakan bahan makanan pokok utama yang sudah biasa di konsumsi masyarakat Indonesia sesuai data yang didapatkan jumlah produksi beras pada tahun 2016 meningkat sebesar 6,37% sehingga hal ini memberikan dampak positif untuk pengurangan impor beras dari luar negeri. Oleh karena itu perlunya pembangunan sektor pertanian yang sesuai dengan tujuan pembangunan sektor pertanian di Indonesia:

1. Untuk memperluas lapangan kerja
2. Meningkatkan kesejahteraan petani
3. Memanfaatkan dan menjaga kelestarian sumber daya alam
4. Meningkatkan pertumbuhan pembangunan di daerah-daerah terpencil bahkan yang masih terisolir.

Adapun jumlah program bantuan yang ada dibalai Penyuluh Pertanian Kecamatan Halong yang masih berjalan saat ini diantara lain : Program Bantuan Pupuk Untuk Perkebunan Program bantuan ini dimulai sejak tahun 2022, Program Bantuan Benih Jagung Hebrida Program ini dimulai sejak tahun 2021, Program Bantuan Bibit Kacang Kedelai di mulai sejak tahun 2021 dan yang terakhir yaitu Program Bantuan Bibit Karet yang dimulai sejak tahun 2018, ada 4 Program bantuan yang masih berjalan di Balai Penyuluh Pertanian Kec. Halong.

Dengan adanya bantuan tersebut petani sangat terbantu dengan adanya program bantuan, karna juga mereka dapat bekerja untuk menghasilkan uang untuk biaya keluarga sehari-hari dan program bantuan ini di khususkan untuk masyarakat yang sudah mempunyai kelompok tani di kecamatan halong, harapannya dapat meningkatkan perkebunan maupun petani yang ada di kecamatan Halong Kabupaten Balangan, Kecamatan Halong sendiri Terdapat 24 Desa dan mempunyai 298 kelompok tani dan setiap kelompok mendapat bantuan yang mana di setiap desanya mempunyai kelompok tanisekitar 10 kelompok dari 10 kelompok tersebut satu kelompok tani tersebut berjumlah 20 anggota perdesanya seperti di Desa Kapul dan Desa Hauwai Jumlah kelompok tani ada 10 kelompok dan setiap satu kelompok berisi 20 anggota jadi bantuan pupuk yang di serahkan ke pihak kelompok taniseharusnya ada 20 pupuk disetiap satu kelompok akan tetapi kadang hanya ada 2 sampai 3 Kelompok dan dari 298 Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Halong tersebut tidak semua Kelompok kebagian bantuan tersebut itu dikarenakan kurangnya bantuan pupuk dan kurangnya anggaran yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Balangan.

Pada penelitian ini, akan menjelaskan tentang Implementasi Program Bantuan Pupuk untuk Masyarakat Desa Kapul dan Desa Hauwai Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Petani di wilayah BPP Kecamatan halong untuk sektor pertanian ini rata-rata yang dihasilkan adalah dari tanaman padi maupun tanaman jagung. Petani lebih memilih kedua tanaman itu karena mereka hanyamengandalkan dua musim. Apabila musim hujan mereka akan lebih kepada menanam padi dan musim kemarau mereka akan lebih mengandalkan jagung.

Fenomena Masalah Belum tepatnya sasaran, sehingga mengakibatkan sebagian kelompok tani tidak mendapat pupuk secara merata. Bantuan pupuk ini di berikan kepada masyarakat yang telah memiliki kelompok tani di setiap desanya akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum membuat kelompok tani tetapi ingin juga untuk mendapatkan bantuan pupuk tersebut itu menjadikan yang telah membuat kelompok tani tidak mendapatkan bantuan tersebut. (*Sumber Data : Balai Penyuluh pertanian BPP Kecamatan Halong*).

Kurangnya pegawai penyuluh sehingga mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan bantuan tersebut sampai kepada pihak kelompok tani, dimana setiap desa itu memiliki hampir 15 kelompok dari 15 kelompok tersebut hanya 1 pegawai yang ditugaskan untuk menghendel bantuan tersebut karena itu bantuan tersebut mengakibatkan keterlambatan datang ke desa-desa yang ada di Kecamatan Halong. (*Sumber Data : Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Halong*). Kurangnya Standar Operasional Prosedur dibalai Penyuluh Pertanian Kecamatan Halong terkait Bantuan Pupuk untuk petani, Sering terjadi penyerahan bantuan di malamhari dan tidak sesuai dengan jam kerja. Oleh karena itu petani merasa terganggu ketika bantuan datang pada malam hari. (*Sumber Data : Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Halong*).

Program ini sendiri masih mengalami kendala seperti berbagai macam permasalahan. Sehingga berjalannya program tidak akan berjalan program dengan maksimal. Karena permasalahan tersebut akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat khususnya petani, sehingga petani tidak akan mendapatkan haknya terkait pupuk. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait penyediaan pupuk tahun 2016 memang masih mengalami banyak kendala hal ini disebabkan dari masih banyaknya fenomena-fenomena tentang pelanggaran yang terjadi terkait penyaluran pupuk. walaupun ada sanksi yang telah diatur apabila terjadi pelanggaran akan tetapi masih banyak penyalahgunaan terkait penyaluran pupuk, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam ketersediaan pupuk. Program bantuan yang dibuat selama ini masih kurang dari kata maksimal sehingga perlunya diadakan implementasi untuk memperbaiki permasalahan terkait penyediaan pupuk di wilayah BPP Kecamatan Halong. Sehingga perlunya implementasi yang baik dalam menerapkan sebuah program bantuan.

Implementasi kebijakan Teori George C. Edward III (dalam Leo Agustino, 2016:149) Menurut pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni :

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apayang akan dikerjakan. Pengetahuan atau apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan harus ditranmisikan (dikomunikasikan). Kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

b. Sumber Daya

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya materi (matrial resources) dan sumberdaya metoda (method resources). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaituan; (a) Respon Implementor terhadap kebijakan, yang terkait deng kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) Intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka parapelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

d. Struktur Birokrasi

Kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terealisasi atau terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Program Bantuan Pupuk adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah. Dengan adanya keterbatasan Pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat. Dan untuk menjamin pengadaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, ditetapkan Keputusan Menteri, yaitu melalui Surat Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Grindle (dalam Eko Handoyo, 2015:95) Implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Ini artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, berarti ada kesalahan dalam analisis kebijakannya.

Van Meter dan Van Horn (dalam Agus Subianto, 2020:18) Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pressman dan Widavsky (dalam Joko Pramono, 2020:1) Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu Proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan.

Tujuan Implementasi Seperti yang disebutkan sebelumnya, implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Mengacu pada pengertian implementasi tersebut, adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
- b. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
- c. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang .
- d. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
- e. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

Pemerintah telah melakukan pembaharuan kebijakan dengan menetapkan Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Bantuan Pupuk Sektor Pertanian. Terdapat beberapa perubahan kebijakan yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat luas, terutama para petani. Diantaranya, komoditas yang disubsidi sebelumnya berjumlah lebih dari 60 jenis, sedangkan Permentan No. 10 Tahun 2022 kini mengatur penyaluran Bantuan Pupuk diprioritaskan pada 9 komoditas utama berdasarkan kebutuhan pangan pokok negara. Sembilan komoditas utama yang dimaksud adalah Padi, Jagung, Kedelai, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, Kopi, Tebu, dan Kakao, dengan luas kepemilikan lahan maksimal 2 Ha per petani.

Begitu pula perubahan pada jumlah jenis Bantuan Pupuk yang semula terdapat 6 jenis pupuk yaitu ZA, Urea, SP-36, NPK, Pupuk Organik, dan Pupuk Organik Cair, berubah menjadi 2 jenis pupuk saja yaitu Urea dan NPK. Urea dan NPK dipertimbangkan sebagai pupuk yang mengandung unsur hara makro esensial yang harus selalu tersedia karena berfungsi dalam proses metabolisme dan biokimia sel tanaman. Maka dari itu, kedua pupuk tersebut dijadikan sebagai pupuk prioritas dan dianggap cukup untuk mendongkrak produktivitas 9 komoditas utama yang disubsidi.

METODE

Penelitian dilakukan Lokasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan terletak di jln. A Yani Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, Balai Penyuluh pertanian (BPP) yang ada di Jl. Simpang Tiga Desa Binjai Punggal Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, Desa Kapul yang berlokasi Jl. Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Desa Hauwai yang berlokasi Jl. Hauwai Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kualitatif. Sumber data adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam penelitian Sumber data menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak Sumber data dalam penelitian ini 10 orang, teknik pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan reduksi data (*Data Reduction*), data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lamapeneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Penyajian data (*Data display*) Penyajian data merupakan suatu kegiatan yang mengatur sekumpulan data secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan. dan kesimpulan (*Conclusion Verification*) merupakan tahapan akhir dari teknik analisis data kualitatif, Tahapan ini bertujuan untuk memberi makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, Data yang telah di dapat diuji kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi, dan member check. Data yang telah di dapat diuji kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi, dan member check.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori George C, Edward III (dalam Leo Agustion, 2016 :149) ada 4 sub variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan Implementasi suatu Program (kebijakan) yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

1. Sosialisasi dapat disimpulkan cukup baik koordinasi yang dilakukan Bpp kecamatan sudah dilakukang sangat baik karena jika bantuan di kirimkan pihak Dinas terkait mengkoordinasi ke pihak kantor Bpp sebaliknya Kantor Bpp jika bantuan pupuk di bagikan juga berkoordinasi denganketua kelompok tani yang ada di kecamatan Halong.
2. Koordinasi dapat disimpulkan sudah baik Balai Penyuluh pertanian maupun masyarakat melakukan koordinasi jika bantuan pupuk dikirim ke kelompok tani.
3. Sumber daya manusia, dapat disimpulkan di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Halong Sudah baik dan mamadai dapat dilihat dari merika melayani ketika bantuan datang untuk dibagikan kepada petani, dan membantu masyrkat petani mengenai usulan-usulan bantuan.
4. Sumber daya material, , dapat disimpulkan dalam hal anggran masih kurang baik karena masih banyak kelompok tani yang tidak kebagian pupuk.
5. Fasilitas, yang tersedia dapat disimpulkan masih kurang baik karena masih ada sebagian kelompok tani yang tidak mendapatkan bantuan.
6. Wewenang, dapat disimpulkan sudah baik karena pemerintah bertanggung jawab dalam hal program ini dan berlandaskan dengan undang-undang.
7. Respon, dapat disimpulkan dari Balai Penyuluh Pertanian halong sudah baik dalam menjalankanprogram bantuan pupuk perkebunan karena ada respon positif yang diberikan oleh bpp kecamatanhalong terkait permasalahan kelompok tani.
8. Pengawasan, dapat disimpulkan kurang baik karena kelompok tani tidak pernah melihat pihak pemerintahan maupun pihak berwajib untuk mengawasi secara langsung saat bantuan di bagikankepada kelompok tani.
9. SOP, dapat disimpulkan Penerimaan bantuan kurang baik, tidak adanya pengarahan yang diberikan masalah bantuan kepada kelompok tani. Pencapaian Tujuan, kurang baik karena masihbanyak masyarakat tidak mendapatkan bantuan.

Implementasi Program Bantuan Pupuk Untuk Desa Kapul Dan Desa Hauwai Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

1. Faktor Yang Menghambat Implementasi Program Bantuan Pupuk Untuk Desa Kapul Dan Desa Hauwai Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
 - a. Masih banyak kelompok tani yang tidak membuat permohonan berupa proposal bantuan pupuk. Karena masih banyak kelompok tani yang awam pengetahuan dikrnakan pendidikannya yang kurang, dan sarana prasarana kurang mendukung seperti kelompok tani yang tidak mempunyai laptop maupun hp, yang mengakibatkan kelompok tani tidak mebuat proposal.
 - b. kurangnya pengawasan dikarenakan masih munculnya penyelewengan pupuk. Pemerintah diminta membangun penyaluran pupuk yang baik guna menekan risiko penyelewengan itu.
 - c. Bantuan datang kurang tepat, karena penyuluh maupun pihak pemerintahan kurang memperhatikan standar operasional prosedur yang ada dan kadang bantuan datang saat musimpanen dan kurangnya penyuluh pada kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Halong.

2. Faktor Pendukung Implementasi Program Bantuan Pupuk Untuk Desa Kapul Dan Desa Hauwai Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
 - a. Sosialisasi
Adanya pemberian Sosialisasi yang dilakukan sudah baik, Pemberian sosialisasi yang sudah baik yang diberikan Balai Penyuluh Pertanian Terhadap Kelompok tani.
 - b. Sumber daya manusia
Adanya Sumber daya manusia seperti pelayanan yang diberikan kepada kelompok tani maupun masyarakat dalam Implementasi Program Bantuan Pupuk Untuk Desa Kapul Dan Desa Hauwai Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
 - c. Respon
Adanya Respon yang baik yang dilakukan oleh Kantor Balai Penyuluh Pertanian kepada Kelompok Tani di kecamatan Halong.
 - d. Koordinasi
Adanya Koordinasi yang dilakukan Oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Halong dengan Dinas Terkait Maupun Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Halong mereka salingber Koordinasi terhadap program bantuan Pupuk setiap bantuan pupuk datang.
 - e. Wewenang
Adanya, wewenang tanggung jawab pemerintah terhadap program bantuan ini seperti saat pengajuan pupuk yang dibutuhkan oleh kelompok tani pemerintah menyetujui walaupun datangnya bantuan tersebut lambat akan tetapi ada respon dari pemerintah, pupuk apa yang dibutuhkan oleh kelompok tani dan pemerintahan juga bertanggung jawab terkait bantuan yang diberikan kepada kelompok tani.

SIMPULAN

Implementasi Program Bantuan Pupuk Untuk Desa Kapul Dan Desa Hauwai Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan cukup baik hal ini dapat dilihat dari indikator pertama Sosialisasi, Balai Penyuluh Pertanian dalam melakukan sosialisasi sudah baik adanya pemberian sosialisasi kepada kelompok tani yang di adakan oleh Bpp Kecamatan Halong. Melakukan koordinasi, koordinasi sudah baik Balai Penyuluh pertanian maupun masyarakat melakukan koordinasi jika bantuan pupuk dikirim ke kelompok tani. Sumber daya manusia, di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Halong Sudah baik dan mamadai. Sumber daya material, dalam hal anggaran masih kurang baik karena masih banyak kelompok tani yang tidak kebagian pupuk. Fasilitas, yang tersedia masih kurang baik karena masih ada sebagian kelompok tani yang tidak mendapatkan bantuan. Wewenang, sudah baik karena pemerintah bertanggung jawab dalam hal program ini dan berlandaskan dengan undang-undang. Respon, dari Balai Penyuluh Pertanian halong sudah baik dalam menjalankan program bantuan pupuk perkebunan. Pengawasan, kurang baik karena kelompok tani tidak pernah melihat pihak pemerintahan maupun pihak berwajib untuk mengawasi secara langsung saat bantuan di bagikan kepada kelompok tani. Sesuai SOP, Penerimaan bantuan kurang baik, tidak adanya pengarahan yang diberikan masalah bantuan kepada kelompok tani. Pencapaian Tujuan, kurang baik karena masih banyak masyarakat tidak mendapatkan bantuan.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Pupuk Untuk Desa Kapul Dan Desa Hauwai Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yaitu : Kurang nya anggaran yang tersedia

untuk Program Bantuan Pupuk Perkebunan oleh karena itu banyak kelompok tani yang belum mendapatkan Bantuan Pupuk Perkebunan dan Fasilitas yang diberikan belum mencukupi karena kelompok tani sangat membutuhkan alat-alat mesin seperti, traktor, alat perontok alat pembasmi hama maupun alat lainnya. Adapun Faktor pendukung yaitu Adanya pemberian Sosialisasi yang dilakukan sudah baik. Pemberian sosialisasi yang sudah baik yang diberikan Balai Penyuluh Pertanian Terhadap Kelompok tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Peraturan Menteri Pertanian No. 273 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Harga Pupuk Bersubsidi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pupuk.

Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta. Eko Handoyo, 2015. Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Franklin, 2015. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Grindle, 2015. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.

Jakarta: Bumi Aksara.

George C. Edward III, 2016. Analisis Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Van Meter dan Van Horn, 2020. Public Policy Making. Sixth Edition. Boston: Houghton Mifflin Company.

Van Metter dan Van Horn, 2015. Kebijakan Publik & Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono, 2013. Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Wahab, 2016. Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Widavsky, 2020. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Warwick, 2015. Pengantar Administrasi Publik (Public Policy) Terjemahan Rick Ismanto. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno Budi, 2019. Kebijakan Publik: Teori Dan Proses. Yogyakarta: Med Press.